

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari Analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwasanya pengembangan *e-Government* pada Pemerintah Provinsi DIY meliputi:

1. Pengembangan Akses yang dilakukan dengan penambahan satu titik interkoneksi ke kabupaten Gunung Kidul, membentuk forum komunikasi informasi masyarakat diempat kabupaten yaitu Sleman, Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul. Memberikan buklet informasi masyarakat, melakukan pemodelan aktifitas KIM, melakukan sosialisasi KIM ke kabupaten, melakukan desiminasi info melalui media pertunra, terlaksananya layanan informasi pada masyarakat, meningkatkan jumlah forum komunikasi layanan informasi publik, melakukan layana aspirasi melalui website. Selain itu Pemerintah Provinsi DIY juga melakuakan pengembangan akses melalui pengembangan interkoneksi jaringan internet yang menghubungkan setiap SKPD di Pemerintah Provinsi DIY juga interkoneksi dengan Pemerintah Kab/Kota se DIY yang secara keseluruhan ada 51 link site yang tercantum pada portal Pemerintah Provinsi DIY.

Dari pengembangan akses yang telah dilakukan oleh pemprov DIY sudah cukup memadai untuk menjalankan dan mengembangkan *e-Government* karena akses yang telah ada sekarang sudah mendukung untuk

proses interaksi antara masyarakat dan pemerintah ataupun antar pemerintah yang terhubung dalam akses Pemprov DIY

2. Pengembangan Portal pelayanan pada website Pemprov DIY dilakukan dengan mengembangkan *Digital Government Service (DGS)* unggulan meliputi: Jogja Belajar, Jogja Sehat, Jogja bisnis, Agricenter, Visiting jogja, Plaza informasi, Bersa kerja online, Fishery business center, Jogja Invest. Dan ada empat portal utama sebagai wadah dari link-link yang bekerjasama dengan Pemprov DIY, ke empat portal tersebut meliputi Portal Warga, Pebisnis, Pemerintahan, dan Portal Pengunjung.

Pengembangan portal yang telah dilakukan sudah sangat baik karena dengan portal yang telah tersedia saat ini Pemprov DIY sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan informasi kepada masyarakat melalui portal-portal yang telah tersedia.

3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi yang dilakukan oleh Pemprov DIY melalui depkominfo seiring dengan pengembangan *e-Government* yang dilakukan yaitu untuk organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi dilakukan melalui dua organisasi utama yaitu melalui LTMI, MIPI dan melalui Plaza Informasi.

Dari kedua Organi yang ada saat ini ada sedikit kekurangan dalam organisai pengelolaan yang ada pada Plaza Informasi yaitu pada pencarian dan pengambilan informasi yang masih dengan sistim jemput bola sehingga hal tersebut bisa memperlambat proses penyampaian informasi.

4. Pengembangan Infrastruktur dan aplikasi dasar yang dilakukan oleh Pemprov DIY meliputi tiga infrastruktur sarana dan prasarana utama yaitu Infrastruktur berupa tanah dan bangunan, Infrastruktur berupa alat transportasi, dan Infrastruktur berupa jaringan komputer yang ketiga itu dilakukan dalam rangka pengembangan *e-Government* di Pemprov DIY.

Dari pengembangan aplikasi dasar dilakukan melalui penyusunan sistem aplikasi *e-Government*, Penyusunan SOP pemanfaatan server, dan Pengelolaan data base pemda, selain itu juga masih ada aplikasi-aplikasi lain yang memungkinkan masyarakat berinteraksi dengan pemerintah seperti aplikasi sms dan email yang ada pada portal Pempor DIY.

Untuk Pengembangan infrastuktur dan aplikasi yang telah dilakukan oleh Pemprov DIY sudah cukup baik dari sarana dan prasarananya, serta dari pengembangan aplikasi-aplikasi dasarnya dirasa sudah memadai untuk menjalankan *e-Government*.

Sedangkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan *e-Government* di Pemerintah Provinsi DIY meliputi:

1. Faktor *e-leadership* sangat besar pengaruhnya dalam pengembangan *e-Government* yang ada pada Pemprov DIY, karena SDM yang mengelola *e-Government* pada Pemprov DIY kekurangan SDM yang berbasis TI dalam pendidikannya sehingga *e-leadership* disana berperan sangat penting guna mengelola dan mengembangkan *e-Government*.

Untuk faktor *e-leadership* baik dalam pengalamannya tentang teknologi dan dalam berinteraksi dengan seluruh anggotanya dalam

organisasi sudah cukup baik sehingga *e-leadership* ini bisa benar-benar menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tupoksi yang telah ada.

2. Peran lingkungan bisnis dalam pengembangan *e-Governmen* di Pemprov DIY cukup besar peranannya, karena dalam melakukan pengembangan seperti infrastruktur seperti jaringan komputer sangat bergantung dengan lingkungan bisnis yang ada pada daerah tersebut sehingga pemerintah harus bekerja sama dengan lingkungan bisnis seperti yang telah dilakukan oleh Pemprov DIY. Selain itu *e-Government* yang dikembangkan Pemprov DIY juga mengakomodir lingkungan bisnis yang ada guna mempromosikan dan merangkulnya guna untuk mengembangkan perekonomian di DIY.

Dari lingkungan bisnis yang ada di DIY sudah sangat baik baik untuk pengembangan *Software* ataupun *hardware* dalam *e-Government* dan dari lingkungan bisnis yang ada serta potensi investasi di DIY bisa di katakan sudah sangat baik.

3. Sumber Daya Manusia berperan sangat penting dalam pengembangan *e-Government* yang dilakukan Pemprov DIY karena SDM langsung berkecimpung dalam pengelolaan *e-Government*. Berkaitan dengan kondisi SDM pengelola *e-Government* di Pemprov DIY yang kurang kompeten dalam membidangi masalah Teknologi Informasi maka ada tujuh pelatihan yang pernah diikuti yaitu pelatihan Teknisi komputer, Pelatihan jaringan komputer, Pelatihan internet dan pembuatan website, Pelatihan sistem informasi manajemen database berbasis website, Pelatihan pemrograman

data base visual, Pelatihan komputer grafis dan multimedia, dan pelatihan Intranet

Sedangkan yang menjadi kelemahan dalam SDM yang ada sekarang adalah kurangnya staff ahli yang berlatar belakang lulusan dari bidang Teknologi Informasi selain itu juga minimnya pelatihan yang diadakan beberapa tahun terakhir dikarenakan tidak adanya anggaran untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan keahliannya dalam hal TI. Selain itu juga seringkali terjadi mutasi yang memungkinkan tenaga yang telah ahli dalam bidang TI di pindahkan ke instansi lain sehingga SDM baru yang masuk kadang tidak sesuai dengan harapan.

## **B. SARAN**

1. Untuk organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi di plaza informasi sebaiknya cepat dibangun sistem pencarian informasi secara elektronik sehingga pengambilan informasi ke daerah-daerah lain khususnya di jogja bisa cepat dan tidak harus koordinasi dengan daerah secara *face to face*.
2. Untuk Pemerintah Daerah sebaiknya tidak memutasi staff-staff yang ada di LTMI dan MIPI untuk di pindah tugaskan secara cuma-cuma tanpa memberikan pengganti yang sepadan karena penggantian kepada staff khususnya staff yang sudah memiliki peran khusus dalam kerjanya akan seperti dalam hal TI akan mengganggu kinerja pada LTMI dan MIPI sebagai pengelola *e-Government* Pemprov DIY.

3. Untuk SDM yang masih kurang keahliannya dalam hal Teknologi Informasi dan Komunka sebaiknya rutin diberi pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang kinerjanya agar bisa lebih baik lagi